

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan mengatasi kemiskinan (Todaro, 2011). Pembangunan memiliki kendala dalam prosesnya, seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kemiskinan menjadi kendala paling besar dalam proses pembangunan karena merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak pada kualitas hidup manusia. Kemiskinan merupakan persoalan yang mendasar suatu bangsa karena hampir sebagian besar aktivitas pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama agenda dalam peningkatan kualitas hidup.

Islam memandang kemiskinan sebagai masalah struktural, karena Allah telah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya dan pada saat yang sama menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Setiap makhluk memiliki rizkinya masing-masing dan mereka tidak akan kelaparan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kemiskinan yaitu :

1. QS Ar-Rum ayat 40

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.”

2. QS Hud ayat 6

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”

3. QS Al-Mulk ayat 15

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

4. QS Al-‘Ankabut ayat 60

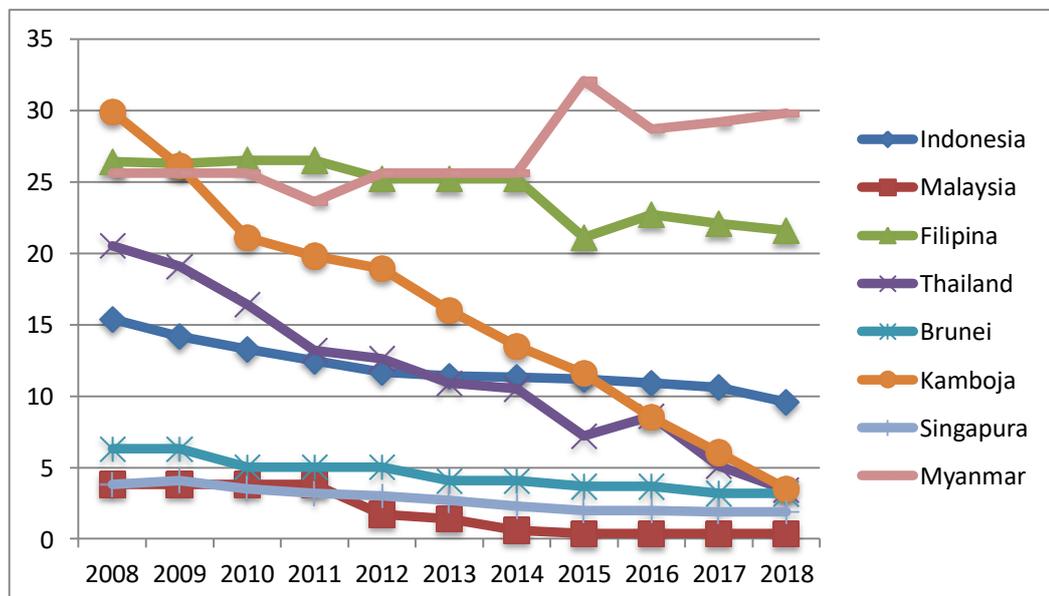
“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

5. QS Thaha ayat 118-119

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,”

“Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.

Makna dari ayat di atas menunjukkan bahwa islam mengatur agar tidak ada kemiskinan yang terjadi. Menurut data *World Bank* menunjukkan bahwa tingkat perkembangan kemiskinan di beberapa negara ASEAN sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2018 mengalami penurunan kecuali Myanmar yang justru mengalami kenaikan. Presentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 15,4 persen menjadi 9,4 persen pada tahun 2018. Kamboja mengalami penurunan presentase penduduk miskin yang signifikan yaitu 29,9 persen pada tahun 2008 menjadi 3,5 persen pada tahun 2018. Berbeda halnya dengan negara Myanmar yang justru mengalami kenaikan dari 25,6 persen pada tahun 2008 menjadi 29,8 pada tahun 2018.



GAMBAR 1.2.

Tingkat Kemiskinan di Beberapa Negara di ASEAN tahun 2008-2018
(Persen)

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan negara dalam pengentasan kemiskinan, namun pembangunan saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif diartikan dengan pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang dalam ekonomi, tetapi juga menjamin akses terhadap peluang ekonomi yang diciptakan untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat miskin (Ali dan Son, 2007).

Pada *Leaders Summit* di los Cabos Meksiko tanggal 18-19 Juni 2012, G20 meluncurkan *Financial Peer Learning Program* (FPLP) dan *Global Partnership on Financial Inclusion* (GPFI). FPLP dan GPFI adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat melalui sistem keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan menjadi agenda penting di tingkat nasional maupun tingkat internasional dikarenakan terdapat 1,7 milyar orang dewasa di dunia yang tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan (CGAP, 2017).

Keuangan inklusif merupakan upaya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan formal dengan cara menghilangkan hambatan, baik hambatan yang bersifat harga maupun hambatan yang bersifat non harga (*World Bank*, 2018). Islam memandang menabung sebagai bagian dari keuangan inklusif dan dijelaskan dalam :

1. Qs.Al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap-apa yang kamu kerjakan”.

2. H.R Bukhari

“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.”

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa islam memandang menabung sebagai sesuatu yang baik di lakukan untuk kebaikan masa depan. Strategi keuangan inklusif muncul karena rendahnya akses keuangan oleh masyarakat yang disebabkan dari tingkat pendapatan yang rendah, pengetahuan masyarakat akan keuangan dan perbankan masih kurang. Biaya administrasi yang dianggap masih tinggi serta jauhnya jangkauan bank dari pemukiman masyarakat. Tujuan strategi keuangan inklusif adalah untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan. Pentingnya sebuah sistem keuangan yang inklusif secara luas diakui dalam lingkaran kebijakan dan inklusi keuangan dipandang sebagai prioritas kebijakan di banyak negara.

Menurut data Global Findex 2017, sekitar 49 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Namun, Indonesia

masih berada di bawah beberapa negara ASEAN yaitu Malaysia 85 persen, Singapura 98, dan Thailand 82 persen. Meskipun Indonesia masih lebih tinggi dibanding dengan Kamboja 22 persen, Myanmar 26 persen, dan Filipina 34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal di beberapa negara ASEAN. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, akses masyarakat yang terhambat disebabkan karena jauhnya jarak cabang bank, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasional dari bank yang kaku. Sedangkan dari sisi permintaan, faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal seperti kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, serta tidak adanya jaminan dan sosial inklusi.

Chithra dan Selvam (2013) menjelaskan keuangan inklusif negara dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial-ekonomi, infrastruktur, dan perbankan. Faktor kondisi sosial-ekonomi antara lain pendapatan per kapita, literasi keuangan, pengangguran, dan populasi desa. Sementara itu yang termasuk dalam kategori infrastruktur dapat berupa jumlah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna internet, jumlah pengguna telepon, penggunaan komputer dan koran. Selanjutnya yang termasuk dalam kategori perbankan adalah jumlah tabungan, deposit dan kredit, koran, dan rasio kredit-deposito.

Sarma dan Pais (2011) mengatakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keuangan inklusif di negara dapat disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur. Beberapa faktor pada keadaan sosial-ekonomi antara lain pendapatan per kapita, angka melek huruf, populasi desa dan pengangguran. Sementara itu yang termasuk dalam kategori infrastruktur adalah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna internet, dan jumlah pengguna telepon.

Park dan Mercado (2015) mengatakan inklusi keuangan berdampak pada kemiskinan karena masalah utama yang rentan dihadapi oleh masyarakat miskin adalah kebutuhan finansial. Oleh karena itu, keuangan inklusi akan menjadi akses yang disediakan untuk mengangkat permasalahan kemiskinan yang ada dinegara-negara maju maupun berkembang yang ada di ASIA.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis keuangan inklusif terhadap kemiskinan di ASEAN. Negara yang akan diteliti oleh penulis adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, dan Myanmar. Sedangkan dua negara anggota ASEAN seperti Laos dan Vietnam tidak masuk dalam penelitian dikarenakan kesulitan data untuk peneliti peroleh. Faktor terkait yang akan diteliti dalam mempengaruhi keuangan inklusif adalah faktor sosial ekonomi yang diwakilkan oleh GDP Per kapita, angka melek huruf, pengangguran, dan faktor infrastruktur yang diwakilkan oleh jalan aspal dan internet.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat Keuangan Inklusif di ASEAN?
2. Bagaimanakah pengaruh GDP Per Kapita terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN?
3. Bagaimanakah pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN?
4. Bagaimanakah pengaruh Infrastruktur (Jalan Aspal) terhadap Keuangan Inklusif dalam di ASEAN?
5. Bagaimanakah pengaruh Infrastruktur (Internet) terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN?
6. Bagaimanakah pengaruh Pengangguran terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN?
7. Bagaimanakah pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan di ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keuangan inklusif terhadap kemiskinan di negara ASEAN. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengetahui tingkat Keuangan Inklusif di ASEAN.
2. Mengetahui pengaruh GDP Per Kapita terhadap keuangan inklusif di ASEAN.

3. Mengetahui pengaruh Angka Melek Huruf terhadap keuangan inklusif di ASEAN.
4. Mengetahui pengaruh infrastruktur (Jalan Aspal) terhadap keuangan Inklusif di ASEAN.
5. Mengetahui pengaruh Infrastruktur (Internet) terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.
6. Mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Keuangan Inklusif di ASEAN.
7. Mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan yang ada di ASEAN.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya mengenai gambaran umum keuangan inklusif dan memberikan gambaran terkait pengaruh keuangan inklusif terhadap kemiskinan di ASEAN.
2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif sehingga dapat di jadikan sebagai bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan strategis terkait dengan peningkatan akses dan penggunaan jasa keuangan terkait dengan kemiskinan.

3. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inklusifitas keuangan disuatu negara.